

LEMBAR INFORMASI NOMOR 5 DRAFT DEKLARASI PBB UNTUK HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Kata-kata Kunci dan Topik

Draft Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
Kelompok kerja terbuka untuk penyusunan draft Deklarasi (Open-ended working group on the draft declaration)

Sub Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia
Komisi Hak-Hak Asasi Manusia

***Ringkasan:** Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat (The Working Group on Indigenous Populations atau biasa disingkat WGIP) telah mulai menyusun draft deklarasi untuk hak-hak masyarakat adat sejak 1985. Kelompok Kerja menyelesaikan draft pada tahun 1993 dan kemudian pada 1995 Komisi Hak-Hak Asasi Manusia membentuk kelompok kerja tersendiri untuk membahas draft tersebut, yang sebelumnya telah disahkan oleh para ahli HAM dalam WGIP dan Sub-Komisi. Lebih dari 100 organisasi masyarakat adat terlibat dalam kelompok kerja tersebut. Sampai saat ini draft deklarasi masih dalam proses pembahasan. Jika draft ini dapat diterima dan disahkan menjadi deklarasi, maka deklarasi ini akan merupakan pernyataan yang paling lengkap mengenai hak-hak masyarakat adat yang pernah disusun: di dalam draft deklarasi hak-hak kolektif masyarakat adat diatur sampai pada tataran yang melebihi apa yang telah diakui oleh hukum HAM internasional sejauh ini.*

Draft Deklarasi PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat: Sebuah Instrumen Baru

Salah satu inisiatif PBB untuk masyarakat adat yang paling progresif adalah pengembangan draft deklarasi PBB untuk hak-hak masyarakat adat¹. Pengesahan deklarasi ini akan menunjukkan indikasi yang jelas betapa masyarakat internasional sangat peduli dan bersungguh-sungguh dalam upaya untuk melindungi hak individu dan hak kolektif masyarakat adat. Meskipun deklarasi ini tidak mengikat secara hukum dan untuk itu tidak memberikan kewajiban hukum kepada pemerintah, deklarasi tersebut membawa kekuatan moral yang besar.

Mengingat kebijakan hak asasi manusia yang ada di tingkat internasional tidak melindungi secara penuh hak-hak masyarakat adat, wakil-wakil masyarakat adat berpendapat bahwa aspirasi tersebut harus dituangkan dalam suatu kebijakan yang baru. Draft Deklarasi merupakan terobosan baru yang menciptakan terobosan baru

¹ Draft deklarasi tersebut belum memiliki nama resmi. Namun, bagi masyarakat adat draft deklarasi tersebut sering disebut "draft deklarasi PBB untuk hak-hak masyarakat adat (United Nations draft Declaration on the rights of Indigenous Peoples, penekanan pada people dan huruf s). Nama ini yang akan digunakan dalam panduan informasi ini.

atas persoalan hak-hak kolektif masyarakat adat yang tidak pernah diakui sebelumnya di dalam hukum HAM internasional. Hak-hak yang tercantum dalam draft tersebut sering dilupakan oleh masyarakat yang dominan: hak untuk bertahan hidup, identitas politik dan budaya, dan kontrol atas sumberdaya. Sejumlah pemerintah mendukung draft tersebut dan yang lain menolak karena keberatan atas beberapa hak yang tercantum di dalamnya.

Batang tubuh draft deklarasi

Draft Deklarasi PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat terdiri dari 19 paragraf pembukaan atau pengantar, dan 19 pasal dibagi menjadi 9 bagian. Batang tubuh mencakup berbagai aspek hak asasi manusia dan hak dasar yang terkait dengan masyarakat adat, termasuk hak untuk melestarikan dan mengembangkan karakteristik budaya dan identitas yang berbeda, kepemilikan dan penggunaan tanah-tanah adat dan sumber daya alam, dan perlindungan terhadap genosida atau pembantaian etnis. Draft Deklarasi juga mencakup hak-hak yang terkait dengan agama, bahasa dan pendidikan, dan hak berpartisipasi dalam urusan politik-ekonomi-sosial di tengah masyarakat dimana kelompok masyarakat adat tersebut hidup. Draft Deklarasi mengakui hak menentukan nasib sendiri, hak mengatur diri sendiri menyangkut masalah-masalah masyarakat adat dan penghargaan atas kesepakatan-kesepakatan menyangkut masyarakat adat.

Secara garis besar, deklarasi tersebut membahas 9 topik sebagai berikut:

- Hak untuk menentukan nasib sendiri, berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, masalah kebangsaan, dan bebas dari diskriminasi
- Ancaman untuk kelangsungan hidup masyarakat adat sebagai masyarakat yang unik.
- Masalah spiritual, bahasa dan identitas budaya masyarakat adat
- Pendidikan, informasi dan hak-hak ketenaga-kerjaan
- Hak untuk berpartisipasi, hak untuk membangun dan hak-hak sosial-ekonomi lainnya
- Hak atas tanah dan sumber-sumber daya lainnya
- Pelaksanaan hak menentukan nasibnya sendiri, kelembagaan adat
- Implementasi deklarasi yang efektif dan aturan umum penutup (dua bagian)

Hak-hak yang dituangkan dalam Draft Deklarasi tersebut merupakan standar minimal bagi perlindungan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh dunia. Draft deklarasi juga mendorong prosedur yang jujur dan adil untuk penyelesaian sengketa antara masyarakat adat dan pemerintah, seperti mediasi, negosiasi dan mekanisme pengaduan dan evaluasi hak-hak asasi manusia yang terdapat di tingkat regional dan internasional. Teks Draft Deklarasi juga dilampirkan dalam paket informasi ini.

Langkah-langkah menuju pengesahan

Setelah mempertimbangkan berbagai alternatif, **Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat (WGIP)** memutuskan untuk membuat “ sebuah Draft Deklarasi untuk hak-hak adat” pada tahun 1985 untuk diadopsi dan disahkan oleh Sidang Umum. Pada tahun 1989, revisi dari draft “ Deklarasi Universal Hak-Hak

Masyarakat Adat” dipublikasikan untuk dijadikan bahan diskusi. Empat tahun kemudian, setelah mengalami kesulitan dalam menyusun metode pembahasan draft yang efektif, Kelompok Kerja menyetujui teks draft deklarasi. Beribu-ribu wakil-wakil masyarakat adat dapat memberikan masukannya walaupun sebagian besar tidak berafiliasi dengan Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) atau wakil dari LSM-LSM yang diakui.

Kelompok Kerja menyerahkan teks draft deklarasi kepada **Sub Komisi Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia** pada 1993. Sub Komisi mengadopsi draft deklarasi pada 1994 dan kemudian menyerahkan teks tersebut kepada Komisi Hak-Hak Asasi Manusia.

Komisi Hak-Hak Asasi Manusia memegang peranan utama dalam membuat instrumen atau kebijakan hak asasi manusia. Sudah menjadi kebiasaan umum bagi Komisi membuat kelompok penyusun draft yang “terbuka”, yang terdiri dari semua unsur pemerintah dan LSM-LSM yang telah memperoleh status konsultatif PBB, untuk menyusun suatu instrumen atau kebijakan. Penyusunan teks pada tingkat Komisi sering kali memakan waktu lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Jika kelompok penyusun telah menyelesaikan tugasnya maka draft diserahkan kepada Komisi. Jika Komisi menerima draft tersebut, maka draft tersebut diberikan kepada Sidang Umum untuk disahkan dan dideklarasikan.

Pada 1995, Komisi membentuk kelompok kerja terbuka (*open-ended working group*) yang bekerja di sela-sela waktu periode persidangan untuk membahas draft deklarasi yang diberikan oleh Sub-Komisi. Kelompok kerja tersebut dikenal dengan nama **Kelompok Kerja untuk Draft Deklarasi**. Komisi juga membuat prosedur yang memungkinkan organisasi masyarakat adat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan draft pada tingkat Komisi. Organisasi masyarakat adat yang tidak memiliki status konsultatif dari Dewan Ekonomi dan Sosial diperbolehkan untuk membantu menyusun draft deklarasi. Lebih dari 100 organisasi yang mewakili masyarakat adat mendapat persetujuan untuk terlibat dalam proses pembuatan draft tersebut.

Kelompok kerja untuk draft deklarasi bertemu sekali dalam setahun selama dua minggu, biasanya pada bulan November. Pada tahun 1997, dua pasal dimasukkan (pasal 5 dan pasal 43). Meskipun kedua pasal tersebut tidak mengandung pernyataan kontroversial namun hal ini merupakan suatu langkah penting dimana kelompok kerja mulai menunjukkan kesepakatan atas teks yang dibahas. Akan tetapi, topik yang harus dibahas masih banyak dan disamping itu terdapat perbedaan pendapat yang tajam mengenai topik-topik utama. Pada umumnya, sebagian besar pemerintah sepakat bahwa dukungan masyarakat adat untuk deklarasi tersebut sangat penting. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai seberapa besar pengaruh yang mestinya dimainkan masyarakat adat dalam menentukan kata demi kata final dalam draft tersebut. Masyarakat adat berpendapat, karena mereka yang menjadi subjek dan penerima manfaat dari deklarasi tersebut maka mereka seharusnya memiliki kontrol atas apa yang menjadi isi deklarasi. Sedangkan di lain pihak, pemerintah berpendapat meskipun pandangan-pandangan masyarakat adat memang dijadikan pertimbangan untuk isi deklarasi, hanya pemerintahlah yang menjadi anggota PBB yang memiliki otoritas untuk pengambilan keputusan akan isi teks yang final.

Draft deklarasi, berdasarkan sistem di PBB, masih dalam tahap awal pembahasan. Komisi HAM telah menetapkan akhir dari Dekade Internasional untuk Masyarakat Adat Sedunia, yaitu 2004, sebagai target waktu untuk mengesahkan draft Deklarasi tersebut. Sidang Umum telah menegaskan bahwa pengesahan draft Deklarasi tersebut merupakan tujuan utama penetapan perayaan Dekade Internasional. Proses pembahasan akan berjalan alot. Yang merupakan tantangan utama adalah bagaimana menghasilkan sebuah deklarasi yang mengandung nilai-nilai pokok dan menjawab harapan masyarakat adat dan juga tetap menghargai pandangan para pemerintah seluruh dunia.

Draft Deklarasi sebagai proses untuk meningkatkan kesadaran

Selain pentingnya peningkatan dan pengakuan standar hak-hak asasi manusia, perbaikan yang mendasar dari pelaksanaan hak asasi manusia secara keseluruhan tergantung pada perubahan sikap dari komunitasnya, pada toleransi yang lebih luas, dan saling menghargai pandangan orang lain. Pembahasan konsep-konsep yang ada di dalam Draft Deklarasi pada tahun-tahun mendatang pada tingkat internasional akan membantu perubahan tersebut.

Masyarakat adat harus terus terlibat dalam pembahasan Draft Deklarasi tersebut. Partisipasi masyarakat adat dalam kelompok kerja terbuka akan berperan memastikan agar teks akhir deklarasi mencerminkan hak-hak masyarakat adat, aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.